

RENCANA KERJA TAHUN 2023

DINAS PUPRPERKIM KAB. BALANGAN



ALAMAT : JL. A. YANI KM.4 NO.14 KEL. BATUPIRING KEC. PARINGIN SELATAN

KODE POS 71600



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Alamat : Jalan A. Yani KM. 4 Kel Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR :/ /SK/DISPUPRPERKIM-BLG/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan program kegiatan yang telah diuraikan pada RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026 maka dipandang perlu untuk melaksanakan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 guna pencapaian Visi, Misi dan Tujuan, serta Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan;
 - b. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Balangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2023 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BALANGAN.

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengevaluasi Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2022 guna pelaksanaan penyusunan yang sesuai dengan tata aturan terbaru;
2. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023;

3. melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023;
4. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Balangan,


RAHMADIAH, ST, MT

NIP. 19760309 200604 2 007

LAMPIRAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 NOMOR: / /SK/DISPUPRPERKIM-BLG/2022
 TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2023 PADA DINAS
 PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN
 KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BALANGAN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2023
 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
 RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BALANGAN

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Pembina
2.	Sekretaris	Pengarah
3.	Kepala Bidang Binamarga	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bidang Cipta Karya	Penanggung Jawab
5.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Penanggung Jawab
6.	Kepala Bidang Penataan Ruang	Penanggung Jawab
7.	Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan	Penanggung Jawab
8.	Kepala Bidang Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman	Penanggung Jawab
9.	Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan	Ketua
10.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
11	Kasubbag. Keuangan	Anggota
12	Kepala Seksi Jalan	Anggota
13	Kepala Seksi Jembatan	
14	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan	Anggota
15	Kepala Seksi Pembangunan Gedung	Anggota
16	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciptakarya	Anggota
17	Kepala Seksi Prasarana Penyehatan Lingkungan	Anggota

18	Kepala Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi	Anggota
19	Kepala Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Anggota
20	Kepala Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi	Anggota
21	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian SDA	Anggota
22	Kepala Seksi Pelaksanaan SDA	Anggota
23	Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Bidang SDA	Anggota
24	Kepala Seksi Perencanaan Ruang	Anggota
25	Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang	Anggota
26	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang	Anggota
27	Kepala Seksi Perumahan	Anggota
28	Kepala Seksi Kawasan Permukiman	Anggota
29	Kepala Seksi Peningkatan PSU	Anggota

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Balangan,



RAHMADIAH, ST, MT

NIP. 19760309 200604 2 007

KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2023 ini akhirnya dapat diselesaikan.


Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sekarang ini dalam menjalankan aktifitasnya menghadapi berbagai kompleksitas permasalahan baik berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Semakin besar Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tersebut, semakin kompleks pula kondisi lingkungan yang perlu dicermati secara seksama untuk mengeliminir kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itulah maka diperlukan suatu pola manajemen yang baik, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dari siklus ini nampak bahwa perencanaan merupakan suatu hal yang sangat signifikan bagi keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mencapai tujuannya.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2023 selain didasarkan oleh hal di atas juga mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008, Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah,

Akhir kata, diharapkan semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dijadikan Pedoman dalam penyusunan Perencanaan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Paringin, 2022

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Balangan


RAHMADIAH, ST, MT
NIP.19760309 200604 2 007

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud Dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 dan Capaian Renstra 2021.....	8
2.2 Analisa Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	17
2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	45
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	47
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	58
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	64
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	64
3.2 Tujuan dan Sasaran renja perangkat Daerah.....	65
3.3 Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan.....	66
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	76
4.1 Rencana kerjadan Pendataan Dinas PUPRPERKIM Tahun 2023	76
4.2 Analisis Sosial Ekonomi.....	86
BAB V PENUTUP	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra perangkat daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

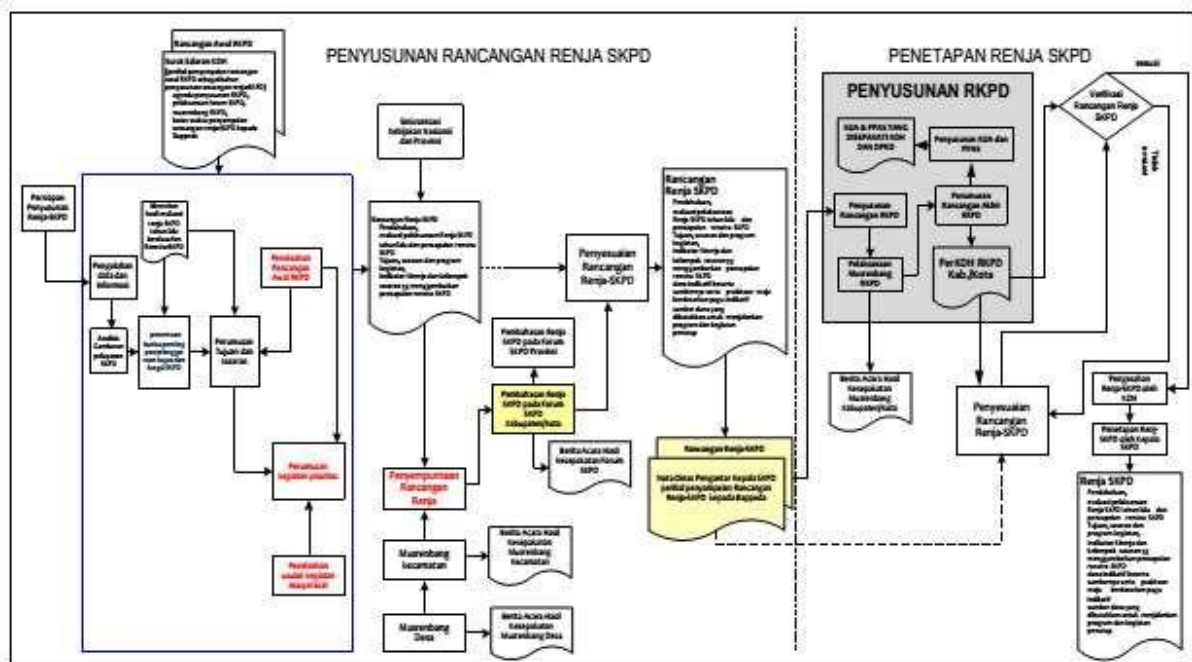
Renja perangkat daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja perangkat daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja perangkat daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja perangkat daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan perangkat daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja perangkat daerah sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah dalam menyusun , mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja perangkat daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja perangkat daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja perangkat daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja perangkat daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja perangkat daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja perangkat daerah yang definitif.

1.1.1 Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja perangkat daerah Kabupaten



Dalam Prosesnya, penyusunan rancangan Renja perangkat daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja perangkat daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat

daerah, evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra perangkat daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja perangkat daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala perangkat daerah menetapkan Renja perangkat daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas perangkat daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Sesuai dengan perubahan yang sudah, sedang dan akan terjadi akhir-akhir ini dimana setiap perangkat daerah dituntut untuk lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka diharapkan perangkat daerah harus dapat menyusun dan membuat suatu Rencana Strategik (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas.

Pembangunan di bidang sarana dan prasarana mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting sebab menyangkut tugas pokok dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan seperti tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional.

Perumusan kebijaksanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana meliputi perencanaan teknis operasional pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan perbaikan prasarana jalan, jembatan, saluran irigasi, drainase dan pelengkap jalan serta bangunan gedung dan penataan ruang serta perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam pembangunan di bidang sarana dan prasarana (jalan, jembatan, saluran irigasi, drainase dan pelengkap jalan serta bangunan gedung dan penataan ruang, serta perumahan dan kawasan permukiman), strategi yang harus dipakai adalah strategi pembinaan yang menampung secara serasi dan seimbang atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Adapun pendekatan yang dipergunakan diantaranya :

- Pendekatan pelayanan yaitu tugas pembinaan yang menyangkut pelayanan terhadap masyarakat pengguna sarana dan prasarana (jalan, jembatan dan saluran irigasi serta perumahan)

- Pendekatan pengembangan wilayah yaitu mengharapkan suatu pengembangan wilayah dan pembangunan / peningkatan daerah baru dengan membuat/membangun sarana dan prasarana baru yang sebelumnya tidak ada atau belum berkembang.

Sejalan dengan apa yang telah diuraikan di atas, pembangunan di bidang sarana dan prasarana di Kabupaten Balangan harus selalu didukung dengan dana sehingga dapat berkembang sesuai yang diharapkan. Semua itu diarahkan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

1.2 Landasan hukum

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 18);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
10. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Pada dasarnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan ini dimaksudkan sebagai arah dan pedoman pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Balangan pada Tahun 2023 serta untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan pembangunan di bidang jalan, jembatan, irigasi, bangunan gedung dan penataan ruang, serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam upaya untuk meningkatkan kualitasnya.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Sebagai pedoman bagi unit kerja terkait yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing, khususnya bagi unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan, sebagai upaya untuk memenuhi pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumber daya air, pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah dan penataan ruang, serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
2. Memudahkan monitoring dan evaluasi, baik awal sampai akhir pelaksanaan program, sehingga memudahkan perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang

1.4 **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan.

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM,

BAB II. PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2021

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022 mengacu pada APBD tahun 2022 dikaitkan dengan pencapaian rencana strategis. rencana strategis, analisa kinerja, isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta program dan kegiatan
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Memuat tentang uraian program dan kegiatan beserta pendanaannya.
- BAB V. PENUTUP
Berisi tentang catatan penting, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan diukur berdasarkan target yang dibuat pada perjanjian kinerja tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan tahun 2021 sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan 2021-2026.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 dan Capaian Renstra Tahun 2021

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan telah berusaha sebaik mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air, jasa konstruksi dan peralatan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan penataan ruang serta tugas pembantuan di Kabupaten Balangan, baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional.

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah dengan dapat dilaksanakannya seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja dari instansi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan pada tahun 2021, termasuk kategori sangat tinggi.

Tabel T-C.29.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)*
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	70	64.61	65	78.27	120.42	65.50		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	16	3	3	3	100	2	8	50.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	16	3	3	3	100	2	8	50.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Pembayaran Gaji PNS dan Laporan Keuangan	84	10	4	4	100	14	28	33.33
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan	84	10	4	4	100	14	28	33.33
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen usulan pencairan anggaran Keuangan yang telah terverifikasi/teruji	60	0	0	0	0	12	12	20.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang dilaksanakan	20	0	5	5	100	3	8	40.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100	0	100	100	100	100	100	100.00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	590	0	0	0	0	150	150	25.42
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	273	0	23	23	100	50	73	26.74

			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi perangkat daerah yang dilaksanakan	100	0	100	100	100	100	100	100.00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	18	0	3	3	100	3	6	33.33
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pelaksanaan Bahan Logistik kantor yang disediakan	64	0	4	4	100	12	16	25.00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pelaksanaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	64	0	4	4	100	12	16	25.00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelaksanaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	64	0	4	4	100	12	16	25.00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	64	0	4	4	100	12	16	25.00
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan administrasi pelayanan, sarana dan prasarana SOPD	100	0	100	100	100	100	100	100.00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64	0	4	4	100	12	16	25.00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	64	0	4	4	100	12	16	25.00
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan sarana dan prasarana SOPD	100	0	100	100	100	100	100	100.00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	64	0	4	4	100	12	16	25.00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Perlengkapan Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	64	0	4	4	100	12	16	25.00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan pemeliharaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	64	0	4	4	100	12	16	25.00

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi mantap	44.39	21.53	23.09	23.43	101.47	24.20	24.20	54.52
				Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	14.90	11.29	11.79	12.35	104.75	12.41	12.41	83.29
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	14.90	11.29	11.79	12.35	104.75	12.41	12.41	83.29
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disusun	11	0	0	0	0	1	1	9.09
			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang dibangun	5	0	0	0	0	1	1	20.00
			Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	6799	2299.5	749	749	100	750	3,799	55.87
			Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah 'Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang direhab	5	0.00	0	0	0	1	1	20.00
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang dibina dan diberdayakan	72	0	12	12	100	12	24	33.33
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	44.39	21.53	23.09	23.43	101.47	24.20	24.20	54.52
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun	4916	0	416	416	100	500	916	18.63
			Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang direhabilitasi	5	0	0	0	0	2	2	40.00
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah 'Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	28	0	0	0	0	6	6	21.43
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	9	0	0	0	0	1	1	11.11
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak	86.27	78.65	81.27	81.72	100.55	82.27	82.27	95.36
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak	86.27	78.65	81.27	81.72	100.55	82.27	82.27	95.36
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR yang terbangun di kawasan perdesaan	2,520	0	0	0	0	280	280	11.11
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang pipa yang terbangun di kawasan perdesaan	6,075	0	1,045	1045	100	1006	2,051	33.76

		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestic	96.76	91.88	92.40	92.61	100.23	92.75	92.75	95.86
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestic	96.76	91.88	92.40	92.61	100.23	92.75	92.75	95.86
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah prasarana sanitasi yang dibangun	2,473	0	208	208	100	665	873	35.30
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sarana sanitasi yang tersedia	6	0	1	1	100	1	2	33.33
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik	89.93	89.27	89.38	89.52	100.16	89.49	89.52	99.54
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan gedung yang dibangun dan dipelihara	42	0	16	14	87.50	10	24	57.14
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan gedung yang dibangun	32	0	16	14	87.50	7	21	65.63
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring	6	0	1	1	100.00	1	2	33.33
		Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan gedung yang di rehab	10	0	3	3	100.00	3	6	60.00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Bangunan yang ditata	5	0	0	0	0	1	1	20.00
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan yang ditata	5	0	0	0	0	1	1	20.00
		Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Bangunan yang di pelihara	5	0	0	0	0	1	1	20.00

			PROGRAM	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	88.47	48.30	55.48	65.24	117.59	66.07	66.07	74.68
			PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jembatan dalam kondisi mantap	90.17	76.90	78.42	85.04	108.44	80.06	80.06	88.79
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam kondisi mantap	270.68	0	48.28	48.28	100.00	39.00	87.28	32.24
			Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang di rekonstruksi	115.79	0	6	6	100.00	38.57	45	38.49
			Rehabilitasi Jalan	panjang jalan yang di rehabilitasi	76.99	0	20	20	100.00	0.80	21	27.02
			Pemeliharaan Rutin Jalan	panjang jalan yang di pelihara secara rutin	4.50	0	0.25	0.25	100.00	0.25	0.50	11.11
			Pembangunan Jembatan	panjang jembatan yang dibangun	742	0	150.00	150.00	100.00	182	332	44.74
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang di pelihara secara rutin	35	0	10	10	100.00	5	15	42.86
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM Jasa Konstruksi dan BUJK yang dibina	60	34.60	40	34.60	86.50	45	45	75.00
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	800	0	100	60	60.00	100	160	20.00
			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat (Org)	800.00	0	100.00	60.00	60.00	100	160	20.00
			Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan bagi BUJK	60	0	30.00	30	100.00	30	60	100.00
			Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah rekomendasi teknis IUJK yang diterbitkan	60	0	30.00	30	100.00	30	60	100.00
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah BUJK yang mengikuti kegiatan sosialisasi / pelatihan / bimbingan teknis	60	0	30.00	30	100.00	30	60	100.00

		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	100.00	10	27.00	17.00	62.96	42	42	42.00
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang	20	0	1	1	100.00	3	4	20.00
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	jumlah bahan substansi penetapan rtrw yang tersusun.	8	0	1	1	100.00	3	4	50.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pemanfaatan ruang	15	0	0	0	0	3	3	20.00
		Sistem Informasi Penataan Ruang	jumlah bahan informasi penataan ruang.	15	0	0	0	0	3	3	20.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	24	0	0	0	0	2	2	8.33
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	jumlah dokumen substansi rapat koordinasi	10	0	0	0	0	2	2	20.00
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100	100	100	100.00
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Data rumah layak huni yang rusak akibat korban bencana	5	0	0	0	0	1	1	20.00
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang dibuat	5	0	0	0	0	1	1	20.00

			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah rusak akibat korban bencana yang telah direhab dan dibangun	77	0	0	0	0	17	17	22.08
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rehabilitasi rumah layak huni untuk korban bencana yang tertangani	51	0	0	0	0	11	11	21.57
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah pembangunan rumah layak huni untuk korban bencana yang tertangani	26	0	0	0	0	6	6	23.08
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani	100.00	71.40	74.08	74.08	100.00	78.49	78.49	78.49
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	100.00	71.40	74.08	74.08	100.00	78.49	78.49	78.49
			Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen yang dibuat	5	0	0	0	0	1	1	20.00
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	luas kawasan kumuh yang tertangani	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	17.00
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Panjang drainase dibangun	1,420	0	0	0	-	284	284.00	20.00
				Panjang jalan yang dibangun	1,345	0	0	0	-	269	269.00	20.00
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97	90.28	90.28	93.75	103.84	95.00	95.00	97.94
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh yang telah direhab	90	60	60	60	100.00	65	65.0	72.22
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rehabilitasi rumah layak huni bagi MBR yang tertangani	550	0	0	0	0	110	110	20.00
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	93	84	85	86.63	101.92	85	86.63	93.15
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan urusan penyelenggaraan PSU perumahan	93	84	85	86.63	101.92	85	86.63	93.15
			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen identifikasi PSU Perumahan	5	0	0	0	0	1	1	20.00
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah rumah yang terlayani jalan dan drainase	8925	0	1425	1425	100	1500	2,925	32.77

2.2. Analisa Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Balangan untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik.

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi/Kabupaten/Kota Balangan

NO	Indikator	SPM/sta n dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Proyek si	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Indeks Infrastruktur Urusan Ke PUPR			30.52	32.79	34.84	36.79	38.75	40.21	33.46							
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap			55.48	66.07	73.67	79.31	85.24	88.47	65.24							
	Persentase jembatan dalam kondisi mantap			78.42	80.06	82.08	84.61	87.61	90.17	85.04							
	Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir			11.79	12.41	13.03	13.65	14.27	14.90	12.35							
	Persentase Luas jaringan daerah irigasi permukaan			23.09	24.2	28.31	34.55	39.24	44.39	23.43							
	Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik			89.38	89.49	89.60	89.71	89.82	89.93	89.52							
	Persentase tersedianya luasan RTH			3.91	4.00	4.05	4.05	4.05	4.05	3.91							
2	Indeks infrastruktur urusan perumahan dan permukiman			22.32	22.85	23.32	23.88	24.35	24.71	22.66							
	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak			81.27	82.27	83.27	84.27	85.27	86.27	81.72							
	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik			92.40	92.75	93.76	94.76	95.76	96.76	92.61							
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni			90.28	95	95	96	96	97	93.75							
	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU			85	85	87	89	91	93	86.63							
	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani			74.08	78.49	84.78	91.71	98	100	74.08							

Capaian Indikator Tujuan Tahun 2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian	Kode
1	Meningkatnya sarana dan prasarana infratraktur public	Indeks infrastruktur urusan ke PUPP	30.52	33.46	109.60	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	Indeks infrastruktur urusan perumahan dan permukiman	22.32	22.66	101.52	Sangat Tinggi

Capaian Indikator Sasaran Tahun 2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian	Kode
1	Meningkatkan sarana dan prasarana infratraktur public	Indeks infrastruktur urusan ke PUPP	30.52	33.46	109.60	Sangat Tinggi
2	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	Indeks infrastruktur urusan perumahan dan permukiman	22.32	22.66	101.52	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Hingga akhir tahun 2021 yang merupakan tahun pertama RPJMD 2021-2026, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan tujuannya melalui 2

(dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun perjanjian kinerja Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan pada tahun 2021 tersebut sebagai berikut :

Pengukuran Indikator Tujuan dengan Tahun Sebelumnya

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi		Capaian Kinerja		Naik/Turun
			2020	2021	2020	2021	
1	Meningkatnya sarana dan prasarana infratraktur public	Indeks infrastruktur urusan ke PUPP	0	33.46	0	109.60	Naik
2	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	Indeks infrastruktur urusan perumahan dan permukiman	0	22.66	0	101.52	Naik

Pengukuran Indikator Sasaran Strategis dengan Tahun Sebelumnya

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi		Capaian Kinerja		Naik/Turun
			2020	2021	2020	2021	
1	Meningkatkan sarana dan prasarana infratraktur public	Indeks infrastruktur urusan ke PUPP	0	33.46	0	109.60	Naik
2	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	Indeks infrastruktur urusan perumahan dan permukiman	0	22.66	0	101.52	Naik

Tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan dalam meningkatkan kinerja di Tahun 2021 telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan di Tahun pertama Renstra, dengan tercapainya indikator tujuan maupun sasaran sebesar lebih dari 100%, indikator tujuan indeks infrastruktur urusan ke PUPR dengan target 30,52 terealisasi 33,46 atau tercapai 109,60% dan indikator tujuan indeks infrastruktur urusan perumahan dan permukiman dengan target 22,32 terealisasi 22,66 atau tercapai 101,52%. Sedangkan indikator sasaran indeks infrastruktur urusan ke PUPR dengan target 30,52 terealisasi 33,46 atau tercapai 109,60% dan indikator sasaran indeks infrastruktur urusan perumahan dan permukiman dengan target 22,32 terealisasi 22,66 atau tercapai 101,52%.

Keberhasilan yang dicapai karena ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan melalui perencanaan program-program dan kegiatan yang tepat dan terarah dalam mewujudkan peningkatan dan pengembangan infrastruktur perdesaan dan perkotaan.

Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun pertama Renstra hampir tidak ada, walaupun dalam pencapaian program dan kegiatan masih terdapat kegiatan yang tidak mencapai target, akan tetapi banyak program dan kegiatan yang mengalami keberhasilan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan adalah :

- Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan-kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan
- Memberi penghargaan bagi kegiatan dengan pencapaian terbaik dan peringatan/teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai upaya mendorong kinerja bidang dalam pelaksanaan kegiatan
- Koordinasi baik ditingkat daerah maupun pusat untuk penyediaan anggaran perbaikan dan pembangunan infrastruktur guna mendukung tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan
- Menambah sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan.

Tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan dapat tercapai melalui pencapaian program dan didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2021, adapun program dan kegiatan yang ada juga tercantum dalam rencana aksi tahun 2021, adapun capaian program tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Capaian Program Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Tolak Ukur Program	Target	Realisasi
1	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur publik	Indeks Infrastruktur Urusan Ke PUPR	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	55,48%	65,24%
				Persentase jembatan dalam kondisi mantap	78,42%	85,04%
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir	11,79%	12,35%
				Persentase Luas jaringan daerah irigasi permukaan	23,09%	23,43%
			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik	89,38%	89,52%
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase tersedianya luasan RTH	3,91%	3,91%
2	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	Indeks infrastruktur urusan perumahan dan permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air limbah	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik	92,40%	92,61%
			Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	90,28%	93,75%
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	85%	86,63%
			Program Kawasan Permukiman	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani	74,08%	74,08%

Analisis Pencapaian Program

- Program Penyelenggaraan Jalan

Indikator Program :

a. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan khususnya di Bidang Bina Marga, indikator yang menjadi penilaian utama adalah sebagai berikut:

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		
Kinerja 2021		
Target	Realisasi	Capaian Kinerja
55.48%	65.24%	117.59

Sesuai dengan keputusan Dirjen Bina Marga No. 77 Tahun 1990, jaringan jalan dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu :

1. Jalan dengan kondisi yang mantap (stabil) adalah jalan yang selalu dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun, terutamanya yang kondisinya sudah baik/sedang yang hanya memerlukan pemeliharaan.
2. Jalan dengan kondisi tidak mantap adalah jalan yang tidak dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun, terutamanya kondisinya rusak/rusak berat yang memerlukan pekerjaan berat (rehabilitasi, perbaikan, konstruksi) termasuk jalan tanah yang saat ini tidak dapat di lewati kendaraan roda 4.

Rumus perhitungan persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap :

Jumlah panjang jalan kondisi mantap (baik + sedang) dibagi dengan total jumlah panjang jalan Kabupaten di kali 100%

$$438.620 / 672.253 \times 100 = 65.24\%$$

Total panjang jalan kabupaten balangan pada tahun 2021 sebesar 672,253 km dengan rincian panjang kondisi jalan kabupaten yang baik 135.760 km, sedang 302.860 km. Total panjang jalan dalam kategori kondisi mantap sebesar 438.620 km sehingga realisasi pencapaian target atas indikator Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap tersebut adalah sebesar 65.24% dari target sebesar 55,48%. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Tinggi**. Adapun

total panjang jalan Kabupaten Balangan pada tahun 2021 sebesar 672,253 km dengan rincian panjang kondisi jalan kabupaten yang baik 135.760 km, dan sedang 302.860 km. Total panjang jalan dalam kategori kondisi mantap sebesar 438.620 km (berdasarkan Permen PU Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tatacara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan) sehingga realisasi pencapaian target atas indikator Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap tersebut adalah sebesar 65.24%.

Foto-Foto Kegiatan

Rekonstruksi / Peningkatan kapasitas struktur jalan Hawaii-Aniuangan



Peningkatan Jalan Murung Jambu-Lampihong



b. Persentase jembatan dalam kondisi mantap

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan khususnya di Bidang Bina Marga, indikator yang menjadi penilaian utama adalah sebagai berikut :

Persentase jembatan dalam kondisi mantap		
Kinerja 2021		
Target	Realisasi	Capaian
78.42%	85.04%	108.44

Rumus perhitungan persentase jembatan dalam kondisi mantap

$$\text{Panjang jembatan dalam kondisi baik} / \text{Panjang total jembatan} \times 100\%$$

$$3.077,8 / 3.619,40 \times 100 = 85,04\%$$

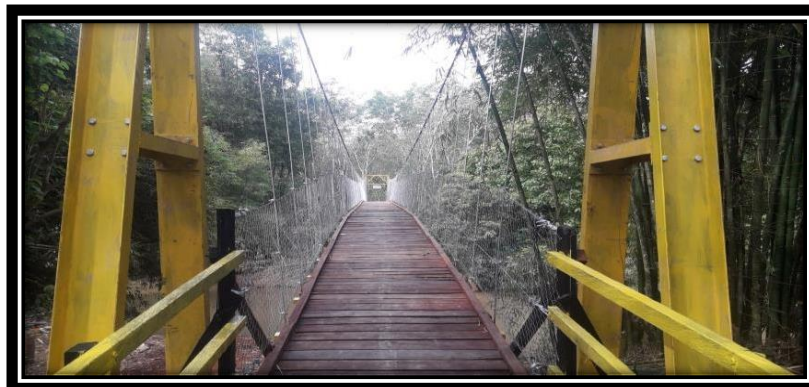
Total panjang jembatan Kabupaten balangan pada tahun 2021 sebesar 3.619,40 meter dengan rincian panjang kondisi jembatan yang mantap 3.077,8 meter, tidak mantap 545,70 meter, sehingga realisasi pencapaian target atas indikator Persentase jembatan dalam kondisi mantap tersebut adalah sebesar 85,04% dari target sebesar 78,42%. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Tinggi**.

Foto-Foto Kegiatan

Pembangunan jembatan gantung Bipak Desa Balida



Pembangunan jembatan gantung Bipak Desa Bangkal



Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Indikator Program :

- a. Persentase panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 capaian kinerja Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan khususnya di Bidang Sumber Daya Air, indikator yang menjadi penilaian utama adalah sebagai berikut :

Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir		
Kinerja 2021		
Target	Realisasi	Capaian
11.79%	12.35%	104,75

Rumus perhitungan persentase panjang infrastruktur pengendali banjir

Panjang tebing sungai yang ditangani / total panjang tebing sungai yang rawan longsor X 100%

$$14.885,40 / 120.554 \times 100 = 12,35\%$$

Pada tahun 2021 panjang tebing sungai yang ditangani telah berjumlah 14.885,40 meter sedangkan total panjang tebing sungai yang rawan longsor sebesar 120.554 meter sehingga di peroleh perhitungan persentase panjang infrastruktur pengendali banjir sebesar 12,35%. Adapun Target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 11,79% sehingga capaian untuk persentase panjang infrastruktur pengendali banjir sebesar 104,75% sehingga dapat dikategorikan capaian kinerja **Sangat Tinggi**.

Kegiatan ini dilakukan di Sungai Halong, Sungai Pitap, Sungai Balangan, Sungai Kambiyain dan Sungai Batumandi.

Foto-Foto Kegiatan

Perkuatan Tebing Sungai Batumandi



Perkuatan Tebing Sungai Desa Auh



- b. Persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi baik

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan khususnya di Bidang Sumber Daya Air, indikator yang menjadi penilaian utama adalah sebagai berikut :

Persentase Luas jaringan daerah irigasi permukaan		
Kinerja 2021		
Target	Realisasi	Capaian
23.09%	23.43%	101.47

Rumus perhitungan persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi baik :

Luas jaringan daerah irigasi dalam kondisi baik /total luas irigasi kewenangan daerah di kali 100%

$$1.379,12 / 6.234 \times 100 = 23,43\%$$

Pada tahun 2021 kegiatan yang dilakukan adalah Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan adapun daerah irigasi yang di lakukan ada pada DI Marias, DI Baruh Panyambaran, DI Bungur Rawa, DIR Lajar, dan DIR Matang Hanau. Pada Tahun 2021 kondisi luas jaringan daerah irigasi dalam kondisi baik sebesar 1.379,12 ha sedangkan total luas irigasi kewenangan daerah sebesar 6.234 ha sehingga diperoleh perhitungan persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan sebesar 23,43%. Adapun target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 23,09 % sedangkan realisasi 23,43% artinya capaian untuk persentase ini adalah 101,47% artinya capaian kinerja dapat dikategorikan **Sangat Tinggi**.

Foto-Foto Kegiatan
Peningkatan Saluran Irigasi Desa Bungur Kec.Batumandi



Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Baruh Panyambaran



Program Penataan Bangunan Gedung

Indikator Program : Persentase bangunan gedung/public dalam kondisi baik

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan khususnya di

Bidang Cipta Karya, indikator yang menjadi penilaian utama adalah sebagai berikut :

Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik		
Kinerja 2021		
Target	Realisasi	Capaian
89.38%	89.52%	100.16

Rumus Perhitungan persentase bangunan gedung/public dalam kondisi baik

:

Jumlah bangunan gedung/public dalam kondisi baik/total bangunan gedung/publik dikali 100%

$$222 / 248 \times 100 = 89,52\%$$

Pada Tahun 2021 ditetapkan target sebesar 89,38% dan realisasi nya 89,52% sehingga capaian nya sebesar 100,16% artinya capaian kinerja ini dapat di kategorikan Sangat Tinggi.

Foto-Foto Kegiatan

Pembangunan Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Balangan Lanjutan



Pembangunan Ruang Arsip Kejaksaan Kabupaten Balangan



Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Indikator Program : Persentase tersedianya Luasan RTH

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan khususnya di

Bidang Penataan Ruang, indikator yang menjadi penilaian utama adalah sebagai berikut :

Persentase tersedianya luasan RTH		
Kinerja 2021		
Target	Realisasi	Capaian
3.91%	3.91%	100.00

Rumus perhitungan persentase tersedianya luasan RTH :

Luasan RTH yang tersedia/20% Luas wilayah perkotaan Kabupaten dikali 100%

Pada tahun 2021 target yang telah ditetapkan untuk persentase tersedianya luasan RTH sebesar 3,91% dan realisasinya 3,91% artinya capaian kinerja 100% dan dapat dikategorikan Sangat Tinggi.

Penyediaan Ruang terbuka hijau (RTH) adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dalam Indikator ini, ditargetkan terpenuhinya RTH sebesar 3,91% dan realisasinya 3,91% artinya capaiannya 100% dan dapat dikategorikan **Sangat Tinggi**.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Indikator Program : Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Balangan khususnya di Bidang Cipta Karya, indikator yang menjadi penilaian utama adalah sebagai berikut :

Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak		
Kinerja 2021		
Target	Realisasi	Capaian
81.27%	81.72%	100.55

Rumus perhitungan Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak :

Jumlah rumah tangga (KK) yang terlayani / Jumlah rumah tangga (KK) seluruh Kabupaten dikali 100%

Pada akhir tahun 2021 jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan (ledeng sampai rumah, ledeng eceran), PDAM, dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi (mata air terlindungi, sumur terlindungi, pompa dan air hujan) adalah sebanyak 32.962 KK. Sedangkan jumlah rumah tangga seluruh Kabupaten Balangan sebanyak 40.333 KK. Realisasi kinerja Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak sebagai berikut :

$$32.962 / 40.333 \times 100\% = 81.,72\%$$

Pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 81,27% terealisasi sebesar 81,72% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100,55% dan melampaui target yang direncanakan dan dapat dikategorikan capaian kinerja yang **Sangat Tinggi**.

Foto-Foto Kegiatan

Kegiatan Pamsimas



Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Indikator Program : Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestic

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan khususnya di Bidang Cipta Karya, indikator yang menjadi penilaian utama adalah sebagai berikut :

Kinerja 2021		
Target	Realisasi	Capaian
92.40%	92.61%	100.23

Rumus perhitungan persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestic :

Jumlah rumah tangga (KK) yang akses limbah domestic / Jumlah rumah Tangga (KK) seluruh Kabupaten di kali 100%

$$37.352 / 40.333 \times 100 = 92,61\%$$

Pada tahun 2021 jumlah rumah tangga (KK) yang dapat mengakses air limbah domestic ditargetkan sebesar 92,40% terealisasi sebesar 92,61% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,23% dan dapat dikategorikan capaian kinerja **Sangat Tinggi**.

Program Pengembangan Perumahan

Indikator Program : Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan khususnya di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, indikator yang menjadi penilaian utama adalah sebagai berikut :

Cakupan ketersediaan rumah layak huni		
Kinerja 2021		
Target	Realisasi	Capaian
90.28%	93.75%	103.84

Rumus perhitungan cakupan ketersediaan rumah layak huni

Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di kali 100%

Pada akhir tahun 2021 jumlah rumah layak huni di Kabupaten Balangan sebesar 37.811 unit sedangkan jumlah rumah seluruh kabupaten yang ada di Balangan sebesar 40.333 unit

$$37.811 / 40.333 \times 100 = 93,75\%$$

Pada tahun 2021 cakupan ketersediaan rumah layak huni di targetkan sebesar 90,28% terealisasi sebesar 93,75% sehingga capaian kinerjanya sebesar 103,84% dan melampaui target yang telah ditentukan sehingga dapat dikategorikan capaian kinerja **Sangat Tinggi**.

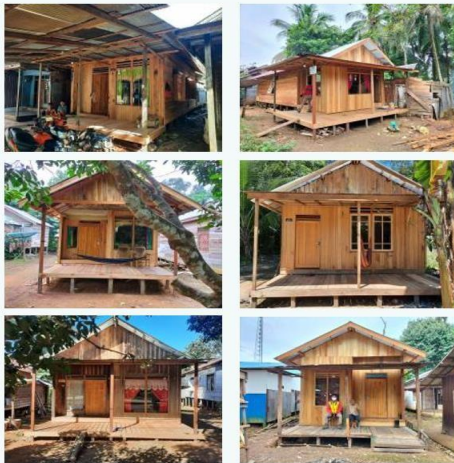
Foto-Foto Kegiatan

KECAMATAN PARINGIN



DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA. 2021

KECAMATAN JUAI



DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA. 2021

Program Peningkatan PSU

Indikator Program : Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan khususnya di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, indikator yang menjadi penilaian utama adalah sebagai berikut :

Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU		
Kinerja 2021		
Target	Realisasi	Capaian
85.00%	86.63%	101.92

Rumus perhitungan Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU :

$$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah seluruh rumah Kabupaten}} \times 100\%$$

$$34.939 / 40.333 \times 100 = 86,63\%$$

Pada akhir tahun 2021 jumlah rumah yang sudah terfasilitasi PSU sebesar 34.939 unit dan jumlah seluruh rumah yang ada di Kabupaten Balangan sebesar 40.333 unit

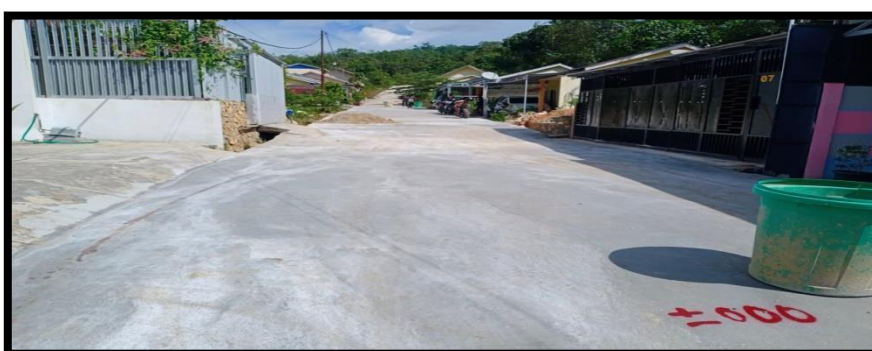
Pada tahun 2021 persentase perumahan yang sudah di lengkapi PSU ditargetkan sebesar 85% terealisasi 86,63% sehingga capaian kinerjanya sebesar 101,92% dan melampaui target yang telah ditentukan dan dapat dikategorikan capaian kinerja **Sangat Tinggi.**

Foto-Foto Kegiatan

Pekerjaan Pembuatan Drainase Desa Lingsir RT.04



Peningkatan Jalan lingkungan RT.14 Kel Parkot Kec.Paringin



Program Kawasan Permukiman

Indikator Program : Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan khususnya di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, indikator yang menjadi penilaian utama adalah sebagai berikut :

Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani

Kinerja 2021		
Target	Realisasi	Capaian
74.08%	74.08%	100.00

Rumus perhitungan Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani :

Luasan permukiman kumuh yang tertangani dibagi dengan luas permukiman kumuh dikali 100%

Pada akhir tahun 2021 luas permukiman kumuh yang telah tertangani sebesar 35,30 ha dari total seluruh luas permukiman kumuh yang ada sebesar 47,65 ha.

$$35,30 / 47,65 \times 100 = 74,08\%$$

Pada tahun 2021 persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani ditargetkan sebesar 74,08% terealisasi sebesar 74,08% sehingga capaian kinerjanya 100% dan dikategorikan capaian kinerja **Sangat Tinggi**.

Foto-Foto Kegiatan



Senada dengan penilaian capaian kinerja, penilaian kinerja anggaran juga tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah input menjadi output, atau proses penyusunan kebijakan / program / kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran didapat dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Total Realisasi Anggaran}}{\text{Total Alokasi Dana}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Pagu}} \times 100 \%$$

Realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan,Ruang,perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2021 sebesar Rp. 97.417.402.609,89, atau 54,47 % dimana alokasi dana yang tersedia sebesar Rp. 178.848.365.529,72.

Adapun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat, maka realisasi anggarannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun Anggaran	Alokasi Dana	Realisasi Anggaran	Capaian
Tahun 2020	Rp. 179.725.999.246,	Rp. 173.540.005.500,00	98,50 %
Tahun 2021	Rp. 178.848.365.529,72,00	Rp. 97.417.402.609,89	54,47 %

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PerumahanRakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dibentuk sesuai Ketentuan dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Sumber Daya Air (SDA), air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Sumber Daya Air (SDA), air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, memiliki fungsi :

- a. Permusan kebijakan dibidang sumber daya air (SDA), air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.

- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi kualifikasi dan registrasi dibidang perumahan dan kawasan permukiman.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dan,
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan tingkat nasional provinsi, rencana tata ruang wilayah dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta memperhatikan dampak dari pandemic covid-19 yang mempengaruhi aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat maka isu strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Bidang Bina Marga

Belum mantapnya kondisi jaringan jalan kabupaten sebagai prasarana transportasi dalam melayani arus lalu lintas barang dan orang yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pengembangan jaringan jalan untuk membuka daerah dan mempermudah transportasi antar Kecamatan dan Desa.

b. Bidang Sumber Daya Air

Penyediaan air baku belum seimbang dengan kebutuhan air bersih masyarakat. Disamping itu seiring dengan bertambahnya penduduk bertambah pula kebutuhan pangan maka diperlukan peningkatan bahan pangan, maka perlu tersedianya saluran irigasi yang berfungsi baik untuk peningkatan produksi pertanian.

c. Bidang Cipta Karya

Belum optimalnya pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman di wilayah Kabupaten Balangan sehingga perlu pembangunan sarana prasarana air bersih dan sanitasi. Disamping itu juga belum optimalnya pembangunan fasilitas publik di Kabupaten Balangan yang merupakan fasilitas parasana dan sarana dalam rangka peningkatan kualitas manusia berupa fasilitas olahraga yang yang berstandar dan layak dan prasarana publik lainnya.

d. Bidang Penataan Ruang dan Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan

Belum optimalnya keselarasan perencanaan Tata Ruang, sebagai unit kerja pengendali tata ruang kabupaten belum bisa mengoptimalkan agar pemanfaatan ruang untuk pembangunan berjalan efisien dan efektif. Belum tersedianya sistem pengendalian dan evaluasi untuk menjamin pemanfaatan ruang transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Disamping itu sebagai Pembina jasa konstruksi belum mampu menyediakan tenaga terampil konstruksi yang cukup dan bersertifikat untuk penyedia pekerjaan konstruksi.

e. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rendahnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman dapat diidentifikasi dari masih rendahnya pemenuhan infrastruktur dasar yang mendukung perumahan dan kawasan permukiman (air bersih layak, sanitasi aman, prasarana sarana utilitas umum perumahan, pengelolaan persampahan, kawasan kumuh) dan masih tingginya rumah tidak layak huni.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023, merupakan tahun kedua RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang disusun dan ditetapkan setelah Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Tema yang dipilih untuk pembangunan tahun 2021 adalah **“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”**

Visi di atas bermaksud bahwa Maju dan Sejahtera yang hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah "kabupaten yang lebih maju dan sejahtera", adalah sebuah profil Kabupaten Balangan yang memiliki masyarakat yang berkemajuan dari sisi pembangunan, Kehidupan masyarakat yang agamis, keadaan yang tertib dan aman, serta masyarakat yang sejahtera. Dalam arti yang lebih luas adalah

Hasil pembangunan Kabupaten Balangan dapat dinikmati dan dirasakan oleh Masyarakat Balangan, berdayaguna dan berhasil guna, serta dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat untuk menuju Masyarakat sejahtera, agamis, aman, dan damai. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kabupaten Balangan yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada ditengah-tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, Kabupaten Balangan secara umum akan lebih berkarakter untuk dapat menempatkan diri sebagai kabupaten yang tidak selalu berada di bawah, tetapi Kabupaten yang sejajar dengan Kabupaten tetangga, lebih maju dan sejahtera.

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2016-2021 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021, yaitu :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan akan melaksanakan 13 Program 24 kegiatan dan 51 sub kegiatan

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota Balangan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Lembar dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				193,504,088,169	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				193,504,088,169	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				184,666,822,169	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				184,666,822,169	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas PUPRPERKIM	Nilai Sakip SKPD	66	16,500,300,169	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas PUPRPERKIM	Nilai Sakip SKPD	66	16,500,300,169	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	2 dok	100,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	2 dok	100,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	50,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	50,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dok	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dok	50,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Pembayaran Gaji PNS dan Laporan Keuangan	14 bulan	7,846,661,369	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Pembayaran Gaji PNS dan Laporan Keuangan	14 bulan	7,846,661,369	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	56 orang	7,666,365,900	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	56 orang	7,666,365,900	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dok	5,295,469	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dok	5,295,469	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3 laporan	175,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3 laporan	175,000,000	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas PUPRPERKIM	Persentase Peningkatan disiplin aparatur	100%	634,090,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas PUPRPERKIM	Persentase Peningkatan disiplin aparatur	100%	634,090,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	409 stel	194,500,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	409 stel	194,500,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	66 orang	439,590,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	66 orang	439,590,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas PUPRPERKIM	Persentase Administrasi perangkat daerah yang dilaksanakan	100%	1,929,139,800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas PUPRPERKIM	Persentase Administrasi perangkat daerah yang dilaksanakan	100%	1,929,139,800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 paket	407,987,700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 paket	407,987,700	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	68,950,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	68,950,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 paket	347,517,600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 paket	347,517,600	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	200 eks	31,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	200 eks	31,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	1,073,684,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	1,073,684,500	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas PUPRPERKIM	Persentase pemenuhan administrasi pelayanan SOPD dan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana SOPD	100%	3,644,875,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas PUPRPERKIM	Persentase pemenuhan administrasi pelayanan SOPD dan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana SOPD	100%	3,644,875,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah unit kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan	5 unit	588,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah unit kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan	5 unit	588,000,000	
	Pengadaan Alat Besar	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah unit alat besar yang disediakan	2 unit	3,000,000,000	Pengadaan Alat Besar	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah unit alat besar yang disediakan	2 unit	3,000,000,000	
	Pengadaan Mebel	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 paket	56,875,000	Pengadaan Mebel	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 paket	56,875,000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PUPRPERKIM	Persentase pemenuhan administrasi pelayanan, sarana dan prasarana SOPD	100%	1,021,475,700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PUPRPERKIM	Persentase pemenuhan administrasi pelayanan, sarana dan prasarana SOPD	100%	1,021,475,700	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	442,525,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	442,525,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	578,950,700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	578,950,700	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PUPRPERKIM	Persentase pemenuhan Pemeliharaan sarana dan prasarana SOPD	100%	1,324,058,300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PUPRPERKIM	Persentase pemenuhan Pemeliharaan sarana dan prasarana SOPD	100%	1,324,058,300	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 unit	641,040,300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 unit	641,040,300	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 paket	120,200,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 paket	120,200,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 paket	562,818,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas PUPRPERKIM	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 paket	562,818,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kabupaten Balangan	Persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi mantap	28,31%	9,963,584,000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kabupaten Balangan	Persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi mantap	28,31%	9,963,584,000	
		Kabupaten Balangan	Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	13,03%			Kabupaten Balangan	Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	13,03%		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	13,03%	7,811,850,900	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	13,03%	7,811,850,900	
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kabupaten Balangan	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dibangun	8 buah	1,713,190,000	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kabupaten Balangan	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dibangun	8 buah	1,713,190,000	
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kabupaten Balangan	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun	100 meter	3,758,990,000	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kabupaten Balangan	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun	100 meter	3,758,990,000	
	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kabupaten Balangan	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang direhabilitasi	3 buah	1,450,690,000	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kabupaten Balangan	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang direhabilitasi	3 buah	1,450,690,000	
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	888,980,900	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	888,980,900	

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Persentase Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	28,31%	2,151,733,100	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Persentase Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	28,31%	2,151,733,100	
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kabupaten Balangan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	200 meter	746,330,000	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kabupaten Balangan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	200 meter	746,330,000	
Rehabilitasi Bendung Irigasi	Kabupaten Balangan	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi	3 buah	958,240,000	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Kabupaten Balangan	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi	3 buah	958,240,000	
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kabupaten Balangan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	250 meter	153,700,000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kabupaten Balangan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	250 meter	153,700,000	
Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Kabupaten Balangan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	100 meter	293,463,100	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Kabupaten Balangan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	100 meter	293,463,100	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kabupaten Balangan	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak	83,27%	4,981,792,000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kabupaten Balangan	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak	83,27%	4,981,792,000	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak	83,27%	4,981,792,000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak	83,27%	4,981,792,000	
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kabupaten Balangan	Peningkatan kapasitas SPAM IKK/perkotaan atau SPAM tematik tertentu	5000 liter/detik	4,981,792,000	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kabupaten Balangan	Peningkatan kapasitas SPAM IKK/perkotaan atau SPAM tematik tertentu	5000 liter/detik	4,981,792,000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kabupaten Balangan	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik	93,76%	1,054,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kabupaten Balangan	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik	93,76%	1,054,000,000	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik yang layak	93,76%	1,054,000,000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik yang layak	93,76%	1,054,000,000	
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kabupaten Balangan	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik	81 buah	854,000,000	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kabupaten Balangan	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik	81 buah	854,000,000	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kabupaten Balangan	Jumlah unit sistem pengelolaan air limbah domestik yang dioperasikan dan dipelihara	1 unit	200,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kabupaten Balangan	Jumlah unit sistem pengelolaan air limbah domestik yang dioperasikan dan dipelihara	1 unit	200,000,000	

	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kabupaten Balangan	Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik	89,60%	23,205,160,000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kabupaten Balangan	Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik	89,60%	23,205,160,000	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kabupaten Balangan	Jumlah Bangunan gedung yang dibangun dan dipelihara	21 buah	23,205,160,000	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kabupaten Balangan	Jumlah Bangunan gedung yang dibangun dan dipelihara	21 buah	23,205,160,000	
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah Kabupaten/Kota	99 dok	18,448,986,000	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah Kabupaten/Kota	99 dok	18,448,986,000	
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara daerah kabupaten/kota	12 laporan	200,000,000	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara daerah kabupaten/kota	12 laporan	200,000,000	
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota yang dilakukan rehabilitasi, renovasi dan ubah suai	21 buah	4,556,174,000	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota yang dilakukan rehabilitasi, renovasi dan ubah suai	21 buah	4,556,174,000	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kabupaten Balangan	Jumlah bangunan yang ditata	6 buah	26,849,692,000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kabupaten Balangan	Jumlah bangunan yang ditata	6 buah	26,849,692,000	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Bangunan yang ditata	6 buah	26,849,692,000	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Bangunan yang ditata	6 buah	26,849,692,000	
	Penataan Bangunan dan lingkungan	Kabupaten Balangan	Jumlah pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	6 buah	26,849,692,000	Penataan Bangunan dan lingkungan	Kabupaten Balangan	Jumlah pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	6 buah	26,849,692,000	

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kabupaten Balangan	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	73,67%	100,935,436,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kabupaten Balangan	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	73,67%	100,935,436,000	
		Persentase Jembatan dalam kondisi baik	82,08%				Persentase Jembatan dalam kondisi baik	82,08%		
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Panjang Jalan dalam kondisi mantap	22,75 km	100,935,436,000	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Panjang Jalan dalam kondisi mantap	22,75 km	100,935,436,000	
Rekonstruksi Jalan	Kabupaten Balangan	Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	20 km	56,233,336,500	Rekonstruksi Jalan	Kabupaten Balangan	Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	20 km	56,233,336,500	
Rehabilitasi Jalan	Kabupaten Balangan	Panjang jalan yang direhabilitasi	2 km	2,499,935,360	Rehabilitasi Jalan	Kabupaten Balangan	Panjang jalan yang direhabilitasi	2 km	2,499,935,360	
Pemeliharaan Rutin Jalan	Kabupaten Balangan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	500 m	849,749,040	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kabupaten Balangan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	500 m	849,749,040	
Pembangunan Jembatan	Kabupaten Balangan	Panjang jembatan yang dibangun	400 m	40,000,000,100	Pembangunan Jembatan	Kabupaten Balangan	Panjang jembatan yang dibangun	400 m	40,000,000,100	
Rehabilitasi Jembatan	Kabupaten Balangan	Panjang jembatan yang dilakukan rehabilitasi	180 m	1,000,007,500	Rehabilitasi Jembatan	Kabupaten Balangan	Panjang jembatan yang dilakukan rehabilitasi	180 m	1,000,007,500	
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kabupaten Balangan	Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	50 m	352,407,500	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kabupaten Balangan	Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	50 m	352,407,500	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kabupaten Balangan	Persentase SDM Jasa Konstruksi dan BUJK yang dibina	50%	454,859,000	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kabupaten Balangan	Persentase SDM Jasa Konstruksi dan BUJK yang dibina	50%	454,859,000	
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kabupaten Balangan	Tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	20 orang	154,429,100	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kabupaten Balangan	Tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	20 orang	154,429,100	
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Kabupaten Balangan	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang tersertifikasi	20 orang	154,429,100	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Kabupaten Balangan	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang tersertifikasi	20 orang	154,429,100	

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Nilai capaian SPM SIPJAKI Kab/Kota	85	138,507,300	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Nilai capaian SPM SIPJAKI Kab/Kota	85	138,507,300	
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kabupaten Balangan	Jumlah laporan penyelenggaraan dukungan manajemen sistem informasi jasa konstruksi	2 laporan	138,507,300	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kabupaten Balangan	Jumlah laporan penyelenggaraan dukungan manajemen sistem informasi jasa konstruksi	2 laporan	138,507,300	
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	1 dok	161,922,600	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	1 dok	161,922,600	
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 dok	161,922,600	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 dok	161,922,600	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Balangan	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	56%	721,999,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Balangan	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	56%	721,999,000	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen rencana tata ruang	1 dok	427,211,400	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen rencana tata ruang	1 dok	427,211,400	
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen kebijakan perda /perkada selain RTRW kabupaten/kota	1 dok	427,211,400	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen kebijakan perda /perkada selain RTRW kabupaten/kota	1 dok	427,211,400	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pemanfaatan ruang	1 kegiatan	140,128,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pemanfaatan ruang	1 kegiatan	140,128,000	
Sistem Informasi Penataan Ruang	Kabupaten Balangan	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 kegiatan	140,128,000	Sistem Informasi Penataan Ruang	Kabupaten Balangan	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 kegiatan	140,128,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	1 dok	154,659,600	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	1 dok	154,659,600	
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	1 dok	154,659,600	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	1 dok	154,659,600	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				8,837,266,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				8,837,266,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kabupaten Balangan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	1,773,945,050	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kabupaten Balangan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	1,773,945,050	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Data rumah layak huni yang rusak akibat korban bencana	1 dok	1,035,916,200	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Data rumah layak huni yang rusak akibat korban bencana	1 dok	1,035,916,200	
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen data rumah dilokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten/Kota	1 dok	1,035,916,200	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen data rumah dilokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten/Kota	1 dok	1,035,916,200	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah rumah rusak akibat korban bencana yang telah direhab dan dibangun	15 unit	738,028,850	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah rumah rusak akibat korban bencana yang telah direhab dan dibangun	15 unit	738,028,850	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kabupaten Balangan	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/kota yang terehabilitasi	10 unit	414,443,850	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kabupaten Balangan	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/kota yang terehabilitasi	10 unit	414,443,850	
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kabupaten Balangan	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/kota yang terbangun	5 unit	323,585,000	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kabupaten Balangan	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/kota yang terbangun	5 unit	323,585,000	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kabupaten Balangan	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani	84,78%	1,973,104,500	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kabupaten Balangan	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani	84,78%	1,973,104,500	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kabupaten Balangan	Persentase Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	100%	740,300,300	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kabupaten Balangan	Persentase Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	100%	740,300,300	
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 dok	740,300,300	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 dok	740,300,300	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kabupaten Balangan	luas kawasan kumuh yang tertangani	3 ha	1,232,804,200	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kabupaten Balangan	luas kawasan kumuh yang tertangani	3 ha	1,232,804,200	
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama dalam perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU	6 dok	1,232,804,200	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama dalam perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU	6 dok	1,232,804,200	

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kabupaten Balangan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	95%	2,365,215,250	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kabupaten Balangan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	95%	2,365,215,250	
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Persentase Rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh yang telah direhab	70%	2,365,215,250	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Persentase Rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh yang telah direhab	70%	2,365,215,250	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kabupaten Balangan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	110 unit	2,365,215,250	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kabupaten Balangan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	110 unit	2,365,215,250	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kabupaten Balangan	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	87%	2,725,001,200	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kabupaten Balangan	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	87%	2,725,001,200	
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kabupaten Balangan	Cakupan urusan penyelenggaraan PSU perumahan	87%	2,725,001,200	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kabupaten Balangan	Cakupan urusan penyelenggaraan PSU perumahan	87%	2,725,001,200	
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 dok	169,921,200	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 dok	169,921,200	
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kabupaten Balangan	Jumlah lokasi perumahan nyang disediakan PSU yang menunjang fungsi hunian	8 lokasi	2,555,080,000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kabupaten Balangan	Jumlah lokasi perumahan nyang disediakan PSU yang menunjang fungsi hunian	8 lokasi	2,555,080,000	
				193,504,088,169					193,504,088,169	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Penataan Ruang Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kabupaten Balangan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam penyusunan renja ini dapat bersumber dari usulan SOPD, dari masukan pihak legislatif (DPRD) maupun aspirasi dari masyarakat dimana usulan-usulan program dan kegiatan tersebut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

Tabel T-C.32.

**FORM HASIL MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2022
YANG TER VERIFIKASI DAN DAPAT DI AKOMODIR DI RENJA 2023**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Paket Pekerjaan	Pagu	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	RT.01 Kec.Lampihong Kab.Balangan	Pembangunan Saluran Irigasi dan Pintu Air	200,000,000	
2	Pembangunan Banguan Perkuatan Tebing	RT.01 Kec.Parsel Kab.Balangan	Pembangunan Bronjong/ Penahan Banjir dan Longsor	200,000,000	
3		RT 01,02,04, Kab. Balangan, Aawayan, Aawayan, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
4		Rt. 04, Kab. Balangan, Lampihong, Lampihong, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
5		RT. 01, Kab. Balangan, Halong, Halong, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
6		RT 01, Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
7		RT 001, Kab. Balangan, Paringin Selatan, Paringin Selatan, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		rt 3, Kab. Balangan, Juai, Juai, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Batu Piring RT.03, Kab. Balangan, Paringin Selatan, Paringin Selatan, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		iyam, Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT 02, Kab. Balangan, Aawayan, Aawayan, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Desa Aniungan, Kab. Balangan, Halong, Halong, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		rt 01, Kab. Balangan, Paringin, Paringin, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Desa mangkayahu Sungai Kanio, Kab. Balangan, Paringin, Paringin, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		rt 2, Kab. Balangan, Juai, Juai, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Desa Tebing Tinggi RT 1,2,3, Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Rt. 01, Kab. Balangan, Batu Mandi, Batu Mandi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		rt 4, Kab. Balangan, Juai, Juai, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		belakang kantor kepala desa, Kab. Balangan, Halong, Halong, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		rt 2, Kab. Balangan, Juai, Juai, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		rt 1, rt 2, Kab. Balangan, Juai, Juai, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
	Rt. 01 dan RT. 02, Kab. Balangan, Lampihong, Lampihong, Seluruh Kelurahan/Desa	200,000,000			
	RT. 04, Kab. Balangan, Batu Mandi, Batu Mandi, Seluruh Kelurahan/Desa	200,000,000			
	rt 1, Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Seluruh Kelurahan/Desa	200,000,000			
	RT.01, Kab. Balangan, Paringin, Paringin, Seluruh Kelurahan/Desa	200,000,000			
	Rt 1 Rt 2 dan Rt 3, Kab. Balangan, Paringin Selatan, Paringin Selatan, Seluruh Kelurahan/Desa	200,000,000			
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	RT 01, Kab. Balangan, Aawayan, Aawayan, Seluruh Kelurahan/Desa	Rehabilitasi Saluran Irigasi, Pintu Air dan Banguan Pelengkap Lainnya	200,000,000	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Desa Bungur RT 02, Kab. Balangan, Batu Mandi, Batu Mandi, Seluruh Kelurahan/Desa	Rehabilitasi Saluran Irigasi, Pintu Air dan Banguan Pelengkap Lainnya	200,000,000	

		RT 1 , 2 dan 3, Kab. Balangan, Paringin, Paringin, Seluruh Kelurahan/Desa		100,000,000	
		RT. 01, Kab. Balangan, Lampihong, Lampihong, Seluruh Kelurahan/Desa		100,000,000	
		RT. 005, Kab. Balangan, Batu Mandi, Batu Mandi, Seluruh Kelurahan/Desa		11,670,000	
		Rt 02, Kab. Balangan, Paringin, Paringin, Seluruh Kelurahan/Desa		100,000,000	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	RT. 1, Kab. Balangan, Batu Mandi, Batu Mandi, Seluruh Kelurahan/Desa	Normalisasi Saluran Irigasi / Sungai/ Danau	200,000,000	
		Desa Riwa RT 02 & RT 03, Kab. Balangan, Batu Mandi, Batu Mandi, Seluruh Kelurahan/Desa		100,000,000	
		RT 03, Kab. Balangan, A wayan, A wayan, Seluruh Kelurahan/Desa		100,000,000	
		RT. 01, Kab. Balangan, Lampihong, Lampihong, Seluruh Kelurahan/Desa		100,000,000	
		RT. 04, Kab. Balangan, Halong, Halong, Seluruh Kelurahan/Desa		100,000,000	
		RT 01. RT 02, RT 03, RT 04, Kab. Balangan, Paringin Selatan, Paringin Selatan, Seluruh Kelurahan/Desa		100,000,000	
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	RT 1 dan 2, Kab. Balangan, Paringin, Paringin, Seluruh Kelurahan/Desa	Pemasangan Jaringan dan Instalasi Air Minum	200,000,000	
		RT. 05, Kab. Balangan, Batu Mandi, Batu Mandi, Seluruh Kelurahan/Desa		228,870,000	
		Desa Mayanau RT 3 (Panikin), Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		rt 05, Kab. Balangan, Paringin, Paringin, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Desa Karya, Kab. Balangan, Halong, Halong, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT. 03/RW. 01 (Andamai), Kab. Balangan, Halong, Halong, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Desa Buntu Pilanduk, Kab. Balangan, Halong, Halong, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	RT. 2, Kab. Balangan, Paringin, Paringin, Seluruh Kelurahan/Desa	Pengadaan Air Bersih/Sumur Bor	200,000,000	
		RT. 02 Sumur Bor, Kab. Balangan, Batu Mandi, Batu Mandi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT.01.02.03 Dan 04, Kab. Balangan, A wayan, A wayan, Seluruh Kelurahan/Desa		161,670,000	
		Desa Uren, Kab. Balangan, Halong, Halong, Seluruh Kelurahan/Desa			
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rt. 01, Kab. Balangan, Lampihong, Lampihong, Seluruh Kelurahan/Desa	Pembangunan Gedung/ Kantor	200,000,000	
		RT 2 (KECAMATAN), Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Desa Puyun, Kab. Balangan, Halong, Halong, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Rt. 01, Kab. Balangan, Lampihong, Lampihong, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Desa Liyu, Kab. Balangan, Halong, Halong, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		area kantor desa tampang, Kab. Balangan, Lampihong, Lampihong, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT 1, Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	

	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	RT. 03, Kab. Balangan, Halong, Halong, Seluruh Kelurahan/Desa	Rehabilitasi Gedung/ Kantor	200,000,000	
		RT 04, Kab. Balangan, Aawayan, Aawayan, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Desa Bungur RT 01, Kab. Balangan, Batu Mandi, Batu Mandi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		kantor kecamatan, Kab. Balangan, Juai, Juai, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Desa Ajung, Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT04, Kab. Balangan, Aawayan, Aawayan, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
	Rekonstruksi Jalan	RT 1, Kab. Balangan, Paringin Selatan, Paringin Selatan, Seluruh Kelurahan/Desa	Peningkatan Jalan Lingkungan	200,000,000	
		Desa Auh RT.01, Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Desa Mayanau RT 3 (Panikn), Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT. 05 dan RT. 05 sampai Batas Desa Mayanau Kecamatan Tebing Tinggi, Kab. Balangan, Halong, Halong, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		rt 3, Kab. Balangan, Juai, Juai, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
	Rehabilitasi Jalan	RT 01, 02, 03, 04, Kab. Balangan, Aawayan, Aawayan, Seluruh Kelurahan/Desa	Rehabilitasi Jalan	200,000,000	
		Desa Gunung Riut, Kab. Balangan, Halong, Halong, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT 03, Kab. Balangan, Aawayan, Aawayan, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT 03, Kab. Balangan, Aawayan, Aawayan, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT 03, Kab. Balangan, Aawayan, Aawayan, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Pengaspalan Jalan produksi sungai Kusi tembus Lokbatu RT 05, Kab. Balangan, Batu Mandi, Batu Mandi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT. 02 menuju RT. 03, Kab. Balangan, Halong, Halong, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
	Pembangunan Jembatan	Rt. 03, Kab. Balangan, Lampihong, Lampihong, Seluruh Kelurahan/Desa	Pembangunan Jembatan	200,000,000	
		Pembangunan Jembatan Box Culvert RT. 03, Kab. Balangan, Batu Mandi, Batu Mandi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Rt 02, Kab. Balangan, Paringin Selatan, Paringin Selatan, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT 2, Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Rt 02, Kab. Balangan, Paringin, Paringin, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Rt. 01, Kab. Balangan, Lampihong, Lampihong, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT.02, Kab. Balangan, Aawayan, Aawayan, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT 03, Kab. Balangan, Aawayan, Aawayan, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Rt. 1, Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		rt 1, Kab. Balangan, Juai, Juai, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Rt. 03, Kab. Balangan, Batu Mandi, Batu Mandi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT 03, Kab. Balangan, Aawayan, Aawayan, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
8		rt 4, Kab. Balangan, Juai, Juai, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT 1, Kab. Balangan, Paringin Selatan, Paringin Selatan, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT.02, Kab. Balangan, Paringin, Paringin, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
	Rt. 3, Kab. Balangan, Paringin Selatan, Paringin Selatan, Seluruh Kelurahan/Desa	200,000,000			

		Desa Auh RT.02, Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Desa Mamigang, Kab. Balangan, Halong, Halong, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		rt 2, Kab. Balangan, Juai, Juai, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT.02, Kab. Balangan, Paringin Selatan, Paringin Selatan, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT.04, Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT 1, Kab. Balangan, Juai, Juai, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Rt. 01, Kab. Balangan, Paringin Selatan, Paringin Selatan, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Rt. 02, Kab. Balangan, Lampihong, Lampihong, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Desa Tebing Tinggi RT 2, Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Rt.02, Kab. Balangan, Lampihong, Lampihong, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		rt 3, Kab. Balangan, Paringin, Paringin, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
	Rehabilitasi Jembatan	RT 002, Kab. Balangan, Paringin Selatan, Paringin Selatan, Seluruh Kelurahan/Desa	Rehabilitasi Jembatan	200,000,000	
		Desa Mamantang, Kab. Balangan, Halong, Halong, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		rt 3, Kab. Balangan, Juai, Juai, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		rt 3, Kab. Balangan, Juai, Juai, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		rt 3, Kab. Balangan, Juai, Juai, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		rt 2, Kab. Balangan, Juai, Juai, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Desa Ajung, Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		rt 01, Kab. Balangan, Paringin, Paringin, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT.2, Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT. 04, Kab. Balangan, Halong, Halong, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT. 04 perbatasan dengan Desa Padang Raya, Kab. Balangan, Halong, Halong, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT 01 sampai 04, Kab. Balangan, Paringin, Paringin, Seluruh Kelurahan/Desa		228,870,000	
		RT. 1-3, Kab. Balangan, Batu Mandi, Batu Mandi, Seluruh Kelurahan/Desa		228,870,000	
		Rt 01,02,03, Kab. Balangan, Paringin Selatan, Paringin Selatan, Seluruh Kelurahan/Desa		228,870,000	
		RT. 1;2;3, Kab. Balangan, Paringin, Paringin, Seluruh Kelurahan/Desa		228,870,000	
		rt 01 dan rt 03, Kab. Balangan, Paringin, Paringin, Seluruh Kelurahan/Desa		49,500,000	
		desa paran, Kab. Balangan, Paringin, Paringin, Seluruh Kelurahan/Desa		71,900,000	
	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Desa dan/rt.1; rt.2; RT.3 dan RT. 4, Kab. Balangan, Paringin, Paringin, Seluruh Kelurahan/Desa	Bantuan Bedah Rumah/ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	228,870,000	
		RT. 03, Kab. Balangan, Paringin Selatan, Paringin Selatan, Seluruh Kelurahan/Desa		228,870,000	
		RT. 01-Rt. 04, Kab. Balangan, Lampihong, Lampihong, Seluruh Kelurahan/Desa		228,870,000	
		rt 1, rt 2, rt 3, Kab. Balangan, Juai, Juai, Seluruh Kelurahan/Desa		228,870,000	
		Rt 01,02 dan 03, Kab. Balangan, Batu Mandi, Batu Mandi, Seluruh Kelurahan/Desa		228,870,000	
		RT 1, 2, Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Seluruh Kelurahan/Desa		228,870,000	
		rt 01 dan rt 02, Kab. Balangan, Paringin, Paringin, Seluruh Kelurahan/Desa		228,870,000	

		Rt 02 Rw 00, Kab. Balangan, Paringin Selatan, Paringin Selatan, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT 02 dan 03, Kab. Balangan, Paringin, Paringin, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Desa Hamparaya, Kab. Balangan, Batu Mandi, Batu Mandi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Desa Sungsum RT 1, 2 dan 3, Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Rt 01 & rt 02, Kab. Balangan, Paringin, Paringin, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT.004 sepanjang 200 meter, Kab. Balangan, Paringin Selatan, Paringin Selatan, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT 01, Kab. Balangan, Juai, Juai, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT 01, 02, 03, 04, 05, Kab. Balangan, Aawayan, Aawayan, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT .01, Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Gang Cempaka RT.02, Kab. Balangan, Paringin Selatan, Paringin Selatan, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		rt 01, Kab. Balangan, Paringin, Paringin, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Rt 003, Kab. Balangan, Paringin Selatan, Paringin Selatan, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT. 08, RT. 09, dan RT. 10 serta dari RT. 02 menuju RT. 11, Kab. Balangan, Halong, Halong, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		1,2, Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		rt 01;rt 02;rt 03, Kab. Balangan, Paringin, Paringin, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT. 01, Kab. Balangan, Halong, Halong, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		rt 01, Kab. Balangan, Paringin, Paringin, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT 01,02,03,04, Kab. Balangan, Aawayan, Aawayan, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT.01, Kab. Balangan, Paringin, Paringin, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT.01, Kab. Balangan, Paringin, Paringin, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT 03, Kab. Balangan, Paringin Selatan, Paringin Selatan, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT. 04, Kab. Balangan, Halong, Halong, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Desa mangkayahu RT.01;02, Kab. Balangan, Paringin, Paringin, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	rt 4, Kab. Balangan, Juai, Juai, Seluruh Kelurahan/Desa	Pembangunan jalan dan drainase	200,000,000	
		rt 3, Kab. Balangan, Juai, Juai, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT 01, Kab. Balangan, Aawayan, Aawayan, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT 01, Kab. Balangan, Juai, Juai, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Dusun 6 dan 7, Kab. Balangan, Juai, Juai, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Desa Tebing Tinggi RT 2, Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT 001, Kab. Balangan, Paringin Selatan, Paringin Selatan, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT 01, 02, 03, Kab. Balangan, Aawayan, Aawayan, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		jl A. Yani , Rt 001, Kab. Balangan, Batu Mandi, Batu Mandi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		rt 1, Kab. Balangan, Juai, Juai, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT 04, Kab. Balangan, Aawayan, Aawayan, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Rt 08 (jl perintis), Kab. Balangan, Paringin, Paringin, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		rt 1, Kab. Balangan, Juai, Juai, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT.01,02 dan 03, Kab. Balangan, Aawayan, Aawayan, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT 01, Kab. Balangan, Juai, Juai, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Rt 01, Kab. Balangan, Batu Mandi, Batu Mandi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		rt 4, Kab. Balangan, Juai, Juai, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT. 01, Kab. Balangan, Halong, Halong, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT. 02, Kab. Balangan, Halong, Halong, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		Desa Ajung, Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT.01, Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT 01, Kab. Balangan, Aawayan, Aawayan, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT 01, Kab. Balangan, Juai, Juai, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		rt 01 jl kampung baru, Kab. Balangan, Paringin, Paringin, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	
		RT 02, Kab. Balangan, Aawayan, Aawayan, Seluruh Kelurahan/Desa		200,000,000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan umum Nasional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang mengacu pada pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 –2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang saat ini telah sampai pada tahap ketiga, diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu dengan memantapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah. Arah kebijakan tersebut meliputi 6 aspek, yaitu ;

- a. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;
- b. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan. Pengembangan Kawasan Perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisikpotensi ekonomi dan budaya lokal;
- c. Arah kebijakan peningkatan keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan adalah peningkatan keterkaitan desa-kota yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dengan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi
- d. Arah kebijakan pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Pengembangan daerah tertinggal difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, serta pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM)

yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis;

- e. Arah kebijakan penanggulangan bencana adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana;
- f. Arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional adalah pengembangan struktur tata ruang dan pengembangan pola ruang;
- g. Arah kebijakan dan strategi tata kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; peningkatan kapasitas keuangan daerah; dan pelaksanaan Otonomi Khusus/Daerah Istimewa.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2023 ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dan memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018, 2019, 2020 serta 2021 terutama dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan guna memastikan perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2023 terkait dengan tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman masuk di dalam misi pertama yaitu Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur Perdesaan Dan Perkotaan.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Balangan memiliki peran di dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana pembangunan. Untuk menyusun dan mengawal implementasi rencana pembangunan, pada tahun 2023 yang akan datang, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan merencanakan akan melaksanakan 13 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 24 kegiatan 51 sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 201.938.869.322,-, terdiri dari belanja langsung.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur publik	Indeks Infrastruktur Urusan Ke PUPR	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur publik	Indeks Infrastruktur Urusan Ke PUPR	29,40	32,25	34,64	36,77	39,04	40,76
Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	Indeks infrastruktur urusan perumahan dan permukiman	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	Indeks infrastruktur urusan perumahan dan permukiman	13,71	14,18	14,55	15,01	15,38	15,64

3.3. Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan

Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laoran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
Sub Kegiatan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
Sub Kegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi
Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
5. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
6. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan
7. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan
Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan

8. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
 - Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
 - Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
9. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
 - Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang
 - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
10. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
 - Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
 - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

11. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU

12. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

13. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota Balangan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
lembar dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				213,349,852,119				234,684,837,331
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				159,814,978,469				175,796,476,316
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip SKPD	Dinas PUPRPERKIM	66	14,137,107,169	APBD II		67	15,550,817,886
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Dinas PUPRPERKIM	2 dok	102,851,800	APBD II		2 dok	113,136,980
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas PUPRPERKIM	2 dok	68,601,800	APBD II		2 dok	75,461,980
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas PUPRPERKIM	2 dok	34,250,000	APBD II		2 dok	37,675,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Pembayaran Gaji PNS dan Laporan Keuangan	Dinas PUPRPERKIM	14 bulan	8,149,319,369	APBD II		14 bulan	8,964,251,306
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinas PUPRPERKIM	56 orang	8,021,334,453	APBD II		56 orang	8,823,467,898
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dinas PUPRPERKIM	12 dok	19,174,916	APBD II		12 dok	21,092,408
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dinas PUPRPERKIM	3 laporan	108,810,000	APBD II		3 laporan	119,691,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan disiplin aparatur	Dinas PUPRPERKIM	100%	1,022,772,000	APBD II		100%	1,125,049,200
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	Dinas PUPRPERKIM	409 stel	87,480,000	APBD II		409 stel	96,228,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas PUPRPERKIM	66 orang	935,292,000	APBD II		66 orang	1,028,821,200
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	Dinas PUPRPERKIM	100%	2,549,979,300	APBD II		100%	2,804,977,230
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dinas PUPRPERKIM	9 paket	418,053,800	APBD II		9 paket	459,859,180
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Dinas PUPRPERKIM	4 paket	66,874,000	APBD II		4 paket	73,561,400
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas PUPRPERKIM	10 paket	332,631,500	APBD II		10 paket	365,894,650
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dinas PUPRPERKIM	200 eks	32,780,000	APBD II		200 eks	36,058,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas PUPRPERKIM	12 laporan	1,699,640,000	APBD II		12 laporan	1,869,604,000

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi pelayanan SOPD dan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana SOPD	Dinas PUPRPERKIM	100%	-	APBD II		100%	-
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Dinas PUPRPERKIM	5 unit	0	APBD II		5 unit	-
				Pengadaan Alat Besar	Jumlah unit alat besar yang disediakan	Dinas PUPRPERKIM	2 unit	0	APBD II		2 unit	-
				Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Dinas PUPRPERKIM	2 paket	0	APBD II		2 paket	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan administrasi pelayanan, sarana dan prasarana SOPD	Dinas PUPRPERKIM	100%	998,503,900	APBD II		100%	1,098,354,290
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Dinas PUPRPERKIM	12 laporan	453,180,000	APBD II		12 laporan	498,498,000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Dinas PUPRPERKIM	12 laporan	545,323,900	APBD II		12 laporan	599,856,290
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan sarana dan prasarana SOPD	Dinas PUPRPERKIM	100%	1,313,680,800	APBD II		100%	1,445,048,880
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Dinas PUPRPERKIM	9 unit	627,370,000	APBD II		9 unit	690,107,000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Dinas PUPRPERKIM	6 paket	78,438,500	APBD II		6 paket	86,282,350
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dinas PUPRPERKIM	1 paket	607,872,300	APBD II		1 paket	668,659,530
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi mantap	Kabupaten Balangan	28,31%	32,262,673,000	APBD II		34,55%	35,488,940,300
					Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	Kabupaten Balangan	13,03%		APBD II		13,65%	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	Kabupaten Balangan	13,03%	26,392,753,000	APBD II		13,65%	29,032,028,300
				Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dibangun	Kabupaten Balangan	8 buah	1,665,090,000	APBD II		8 buah	1,831,599,000
				Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun	Kabupaten Balangan	100 meter	22,043,340,000	APBD II		100 meter	24,247,674,000
				Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang direhabilitasi	Kabupaten Balangan	3 buah	2,000,000,000	APBD II		3 buah	2,200,000,000
				Pembinaan dan Pemberdayaan Kelenbagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	20 orang	684,323,000	APBD II			752,755,300
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	Kabupaten Balangan	28,31%	5,869,920,000	APBD II		34,55%	6,456,912,000
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	Kabupaten Balangan	200 meter	2,372,870,000	APBD II			2,610,157,000
				Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi	Kabupaten Balangan	3 buah	0	APBD II		4 paket	-
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	Kabupaten Balangan	250 meter	1,949,300,000	APBD II			2,144,230,000
				Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	Kabupaten Balangan	100 meter	1,547,750,000	APBD II			1,702,525,000

				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak	Kabupaten Balangan	83,27%	4,428,870,000	APBD II		84,27%	4,871,757,000
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak	Kabupaten Balangan	83,27%	4,428,870,000	APBD II		84,27%	4,871,757,000
				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan kapasitas SPAM IKK/perkotaan atau SPAM tematik tertentu	Kabupaten Balangan	5000 liter/detik	4,428,870,000	APBD II		5000 liter/detik	4,871,757,000
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik	Kabupaten Balangan	93,76%	1,206,469,200	APBD II		94,76%	1,327,116,120
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik yang layak	Kabupaten Balangan	93,76%	1,206,469,200	APBD II		94,76%	1,327,116,120
				Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik	Kabupaten Balangan	81 buah	986,670,000	APBD II		81 buah	1,085,337,000
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah unit sistem pengelolaan air limbah domestik yang dioperasikan dan dipelihara	Kabupaten Balangan	1 unit	219,799,200	APBD II		1 unit	241,779,120
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik	Kabupaten Balangan	89,60%	9,379,936,400	APBD II		89,71%	10,317,930,040
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan gedung yang dibangun dan dipelihara	Kabupaten Balangan	21 buah	9,379,936,400	APBD II		21 buah	10,317,930,040
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	99 dok	4,625,000,000	APBD II		99 dok	5,087,500,000
				Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara daerah kabupaten/kota	Kabupaten Balangan	12 laporan	228,636,400	APBD II		12 laporan	251,500,040
				Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuaai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota yang dilakukan rehabilitasi, renovasi dan ubah suai	Kabupaten Balangan	21 buah	4,526,300,000	APBD II		21 buah	4,978,930,000
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah bangunan yang ditata	Kabupaten Balangan	6 buah	14,756,534,300	APBD II		6 buah	16,232,187,730
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan yang ditata	Kabupaten Balangan	6 buah	14,756,534,300	APBD II		6 buah	16,232,187,730
				Penataan Bangunan dan lingkungan	Jumlah pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	Kabupaten Balangan	6 buah	14,756,534,300	APBD II		6 buah	16,232,187,730
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	Kabupaten Balangan	73,67%	77,913,633,500	APBD II		79,31%	85,704,996,850
					Persentase Jembatan dalam kondisi baik		82,08%		APBD II		84,61%	
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam kondisi mantap	Kabupaten Balangan	22,75 km	77,913,633,500	APBD II		22,75 km	85,704,996,850
				Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	Kabupaten Balangan	20 km	64,296,250,000	APBD II		20 km	70,725,875,000
				Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	Kabupaten Balangan	2 km	1,854,940,000	APBD II		2 km	2,040,434,000
				Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Kabupaten Balangan	500 m	840,766,000	APBD II		500 m	924,842,600
				Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	Kabupaten Balangan	400 m	5,825,300,000	APBD II		400 m	6,407,830,000
				Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan rehabilitasi	Kabupaten Balangan	180 m	4,743,970,000	APBD II		180 m	5,218,367,000
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan	Kabupaten Balangan	50 m	352,407,500	APBD II		50 m	387,648,250

				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM Jasa Konstruksi dan BUJK yang dibina	Kabupaten Balangan	50%	3,985,009,000	APBD II		58%	4,383,509,900
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	Kabupaten Balangan	20 orang	174,180,000	APBD II		20 orang	191,598,000
				Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang tersertifikasi	Kabupaten Balangan	20 orang	174,180,000	APBD II		20 orang	191,598,000
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai capaian SPM SIPJAKI Kab/Kota	Kabupaten Balangan	85	140,069,000	APBD II		90	154,075,900
				Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah laporan penyelenggaraan dukungan manajemen sistem informasi jasa konstruksi	Kabupaten Balangan	2 laporan	140,069,000	APBD II		2 laporan	154,075,900
				Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	Kabupaten Balangan	1 dok	3,670,760,000	APBD II		1 dok	4,037,836,000
				Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kabupaten Balangan	1 dok	3,670,760,000	APBD II		1 dok	4,037,836,000
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	Kabupaten Balangan	56%	1,744,745,900	APBD II		75%	1,919,220,490
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang	Kabupaten Balangan	1 dok	752,428,100	APBD II			827,670,910
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan perda /perkada selain RTRW kabupaten/kota	Kabupaten Balangan	1 dok	752,428,100	APBD II			827,670,910
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pemanfaatan ruang	Kabupaten Balangan	1 kegiatan	449,117,800	APBD II			494,029,580
				Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Kabupaten Balangan	1 kegiatan	449,117,800	APBD II			494,029,580
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	Kabupaten Balangan	1 dok	543,200,000	APBD II			597,520,000
				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Kabupaten Balangan	1 dok	543,200,000	APBD II			597,520,000
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				53,534,873,650	APBD II			58,888,361,015
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Kabupaten Balangan	100%	529,168,000	APBD II		100%	582,084,800
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Data rumah layak huni yang rusak akibat korban bencana	Kabupaten Balangan	1 dok	177,366,000	APBD II		1 dok	195,102,600
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	1 dok	177,366,000	APBD II		1 dok	195,102,600

				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah rusak akibat korban bencana yang telah direhab dan dibangun	Kabupaten Balangan	15 unit	351,802,000	APBD II		15 unit	386,982,200
				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/kota yang terehabilitasi	Kabupaten Balangan	10 unit	188,476,000	APBD II		10 unit	207,323,600
				Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/kota yang terbangun	Kabupaten Balangan	5 unit	163,326,000	APBD II		5 unit	179,658,600
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani	Kabupaten Balangan	84,78%	688,469,700	APBD II		91,71%	757,316,670
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	Kabupaten Balangan	100%	577,081,400	APBD II		100%	634,789,540
				Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Kabupaten Balangan	1 dok	577,081,400	APBD II			634,789,540
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	luas kawasan kumuh yang tertangani	Kabupaten Balangan	3 ha	111,388,300	APBD II		3,3 ha	122,527,130
				Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama dalam perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU	Kabupaten Balangan	6 dok	111,388,300	APBD II			122,527,130
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Kabupaten Balangan	95%	3,958,166,000	APBD II		96%	4,353,982,600
				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh yang telah direhab	Kabupaten Balangan	70%	3,958,166,000	APBD II		75%	4,353,982,600
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	Kabupaten Balangan	110 unit	3,958,166,000	APBD II			4,353,982,600
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Kabupaten Balangan	87%	48,359,069,950	APBD II		89%	53,194,976,945
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan urusan penyelenggaraan PSU perumahan	Kabupaten Balangan	87%	48,359,069,950	APBD II		89%	53,194,976,945
				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kabupaten Balangan	1 dok	31,620,000	APBD II			34,782,000
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan nyang disediakan PSU yang menunjang fungsi hunian	Kabupaten Balangan	8 lokasi	48,327,449,950	APBD II			53,160,194,945
								213,349,852,119				234,684,837,331

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas PUPRPERKIM Tahun 2023

Rencana Kerja Dinas PUPRPERKIM Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahun 2023 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi program kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Dinas PUPRPERKIM, Renja Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dalam kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Rencana kerja dan pendanaan Dinas PUPRPERKIM Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2023, Prioritas Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 benar-benar yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Pelaksanaan kegiatan Renja Tahun 2023 harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang, satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun mengakomodir usulam masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu – isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Berdasarkan isu – isu strategis tahun 2023 seperti tersebut pada bab terdahulu, maka prioritas program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan diarahkan pada :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

- Kantor atau Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
Sub Kegiatan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
Sub Kegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi
Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
 5. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
6. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
- Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan
7. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
- Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
- Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
- Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan
- Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan
8. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
- Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- Sub Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
- Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
- Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
- Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
9. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
- Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
10. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
11. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
12. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

13. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Tabel T-C.33.									
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024									
Provinsi/Kabupaten/Kota Balangan									
Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
lembar dari									
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				213,349,852,119				234,684,837,331
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				159,814,978,469				175,796,476,316
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sajikan SKPD	Dinas PUPRPERKIM	66	14,137,107,169	APBD II		67	15,550,817,886
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Dinas PUPRPERKIM	2 dok	102,851,800	APBD II		2 dok	113,136,980
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas PUPRPERKIM	2 dok	68,601,800	APBD II		2 dok	75,461,980
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas PUPRPERKIM	2 dok	34,250,000	APBD II		2 dok	37,675,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Pembayaran Gaji PNS dan Laporan Keuangan	Dinas PUPRPERKIM	14 bulan	8,149,319,369	APBD II		14 bulan	8,964,251,306
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinas PUPRPERKIM	56 orang	8,021,334,453	APBD II		56 orang	8,823,467,898
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dinas PUPRPERKIM	12 dok	19,174,916	APBD II		12 dok	21,092,408
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dinas PUPRPERKIM	3 laporan	108,810,000	APBD II		3 laporan	119,691,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan disiplin aparatur	Dinas PUPRPERKIM	100%	1,022,772,000	APBD II		100%	1,125,049,200
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	Dinas PUPRPERKIM	409 stel	87,480,000	APBD II		409 stel	96,228,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas PUPRPERKIM	66 orang	935,292,000	APBD II		66 orang	1,028,821,200
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	Dinas PUPRPERKIM	100%	2,549,979,300	APBD II		100%	2,804,977,230
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dinas PUPRPERKIM	9 paket	418,053,800	APBD II		9 paket	459,859,180
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Dinas PUPRPERKIM	4 paket	66,874,000	APBD II		4 paket	73,561,400
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas PUPRPERKIM	10 paket	332,631,500	APBD II		10 paket	365,894,650
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dinas PUPRPERKIM	200 eks	32,780,000	APBD II		200 eks	36,058,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas PUPRPERKIM	12 laporan	1,699,640,000	APBD II		12 laporan	1,869,604,000

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi pelayanan SOPD dan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana SOPD	Dinas PUPRPERKIM	100%	-	APBD II		100%	-
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Dinas PUPRPERKIM	5 unit	0	APBD II		5 unit	-
				Pengadaan Alat Besar	Jumlah unit alat besar yang disediakan	Dinas PUPRPERKIM	2 unit	0	APBD II		2 unit	-
				Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Dinas PUPRPERKIM	2 paket	0	APBD II		2 paket	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan administrasi pelayanan, sarana dan prasarana SOPD	Dinas PUPRPERKIM	100%	998,503,900	APBD II		100%	1,098,354,290
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Dinas PUPRPERKIM	12 laporan	453,180,000	APBD II		12 laporan	498,498,000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Dinas PUPRPERKIM	12 laporan	545,323,900	APBD II		12 laporan	599,856,290
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan sarana dan prasarana SOPD	Dinas PUPRPERKIM	100%	1,313,680,800	APBD II		100%	1,445,048,880
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Dinas PUPRPERKIM	9 unit	627,370,000	APBD II		9 unit	690,107,000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Dinas PUPRPERKIM	6 paket	78,438,500	APBD II		6 paket	86,282,350
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dinas PUPRPERKIM	1 paket	607,872,300	APBD II		1 paket	668,659,530
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi mantap	Kabupaten Balangan	28,31%	32,262,673,000	APBD II		34,55%	35,488,940,300
					Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	Kabupaten Balangan	13,03%		APBD II		13,65%	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	Kabupaten Balangan	13,03%	26,392,753,000	APBD II		13,65%	29,032,028,300
				Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dibangun	Kabupaten Balangan	8 buah	1,665,090,000	APBD II		8 buah	1,831,599,000
				Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun	Kabupaten Balangan	100 meter	22,043,340,000	APBD II		100 meter	24,247,674,000
				Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang direhabilitasi	Kabupaten Balangan	3 buah	2,000,000,000	APBD II		3 buah	2,200,000,000
				Pembinaan dan Pemberdayaan Kelenbagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	20 orang	684,323,000	APBD II			752,755,300
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	Kabupaten Balangan	28,31%	5,869,920,000	APBD II		34,55%	6,456,912,000
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	Kabupaten Balangan	200 meter	2,372,870,000	APBD II			2,610,157,000
				Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi	Kabupaten Balangan	3 buah	0	APBD II		4 paket	-
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	Kabupaten Balangan	250 meter	1,949,300,000	APBD II			2,144,230,000
				Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	Kabupaten Balangan	100 meter	1,547,750,000	APBD II			1,702,525,000

				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak	Kabupaten Balangan	83,27%	4,428,870,000	APBD II		84,27%	4,871,757,000
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak	Kabupaten Balangan	83,27%	4,428,870,000	APBD II		84,27%	4,871,757,000
				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan kapasitas SPAM IKK/perkotaan atau SPAM tematik tertentu	Kabupaten Balangan	5000 liter/detik	4,428,870,000	APBD II		5000 liter/detik	4,871,757,000
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik	Kabupaten Balangan	93,76%	1,206,469,200	APBD II		94,76%	1,327,116,120
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik yang layak	Kabupaten Balangan	93,76%	1,206,469,200	APBD II		94,76%	1,327,116,120
				Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik	Kabupaten Balangan	81 buah	986,670,000	APBD II		81 buah	1,085,337,000
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah unit sistem pengelolaan air limbah domestik yang dioperasikan dan dipelihara	Kabupaten Balangan	1 unit	219,799,200	APBD II		1 unit	241,779,120
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik	Kabupaten Balangan	89,60%	9,379,936,400	APBD II		89,71%	10,317,930,040
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan gedung yang dibangun dan dipelihara	Kabupaten Balangan	21 buah	9,379,936,400	APBD II		21 buah	10,317,930,040
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	99 dok	4,625,000,000	APBD II		99 dok	5,087,500,000
				Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara daerah kabupaten/kota	Kabupaten Balangan	12 laporan	228,636,400	APBD II		12 laporan	251,500,040
				Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuaai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota yang dilakukan rehabilitasi, renovasi dan ubah suai	Kabupaten Balangan	21 buah	4,526,300,000	APBD II		21 buah	4,978,930,000
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah bangunan yang ditata	Kabupaten Balangan	6 buah	14,756,534,300	APBD II		6 buah	16,232,187,730
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan yang ditata	Kabupaten Balangan	6 buah	14,756,534,300	APBD II		6 buah	16,232,187,730
				Penataan Bangunan dan lingkungan	Jumlah pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	Kabupaten Balangan	6 buah	14,756,534,300	APBD II		6 buah	16,232,187,730
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	Kabupaten Balangan	73,67%	77,913,633,500	APBD II		79,31%	85,704,996,850
					Persentase Jembatan dalam kondisi baik		82,08%		APBD II		84,61%	
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam kondisi mantap	Kabupaten Balangan	22,75 km	77,913,633,500	APBD II		22,75 km	85,704,996,850
				Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	Kabupaten Balangan	20 km	64,296,250,000	APBD II		20 km	70,725,875,000
				Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	Kabupaten Balangan	2 km	1,854,940,000	APBD II		2 km	2,040,434,000
				Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Kabupaten Balangan	500 m	840,766,000	APBD II		500 m	924,842,600
				Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	Kabupaten Balangan	400 m	5,825,300,000	APBD II		400 m	6,407,830,000
				Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan rehabilitasi	Kabupaten Balangan	180 m	4,743,970,000	APBD II		180 m	5,218,367,000
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan	Kabupaten Balangan	50 m	352,407,500	APBD II		50 m	387,648,250

				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM Jasa Konstruksi dan BUJK yang dibina	Kabupaten Balangan	50%	3,985,009,000	APBD II		58%	4,383,509,900
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	Kabupaten Balangan	20 orang	174,180,000	APBD II		20 orang	191,598,000
				Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang tersertifikasi	Kabupaten Balangan	20 orang	174,180,000	APBD II		20 orang	191,598,000
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai capaian SPM SIJAKI Kab/Kota	Kabupaten Balangan	85	140,069,000	APBD II		90	154,075,900
				Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah laporan penyelenggaraan dukungan manajemen sistem informasi jasa konstruksi	Kabupaten Balangan	2 laporan	140,069,000	APBD II		2 laporan	154,075,900
				Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	Kabupaten Balangan	1 dok	3,670,760,000	APBD II		1 dok	4,037,836,000
				Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kabupaten Balangan	1 dok	3,670,760,000	APBD II		1 dok	4,037,836,000
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	Kabupaten Balangan	56%	1,744,745,900	APBD II		75%	1,919,220,490
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang	Kabupaten Balangan	1 dok	752,428,100	APBD II			827,670,910
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan perda /perkada selain RTRW kabupaten/kota	Kabupaten Balangan	1 dok	752,428,100	APBD II			827,670,910
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pemanfaatan ruang	Kabupaten Balangan	1 kegiatan	449,117,800	APBD II			494,029,580
				Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Kabupaten Balangan	1 kegiatan	449,117,800	APBD II			494,029,580
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	Kabupaten Balangan	1 dok	543,200,000	APBD II			597,520,000
				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Kabupaten Balangan	1 dok	543,200,000	APBD II			597,520,000
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				53,534,873,650	APBD II			58,888,361,015
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Kabupaten Balangan	100%	529,168,000	APBD II		100%	582,084,800
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Data rumah layak huni yang rusak akibat korban bencana	Kabupaten Balangan	1 dok	177,366,000	APBD II		1 dok	195,102,600
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah dilokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	1 dok	177,366,000	APBD II		1 dok	195,102,600

				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah rusak akibat korban bencana yang telah direhab dan dibangun	Kabupaten Balangan	15 unit	351,802,000	APBD II		15 unit	386,982,200
				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/kota yang terehabilitasi	Kabupaten Balangan	10 unit	188,476,000	APBD II		10 unit	207,323,600
				Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/kota yang terbangun	Kabupaten Balangan	5 unit	163,326,000	APBD II		5 unit	179,658,600
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani	Kabupaten Balangan	84,78%	688,469,700	APBD II		91,71%	757,316,670
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	Kabupaten Balangan	100%	577,081,400	APBD II		100%	634,789,540
				Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Kabupaten Balangan	1 dok	577,081,400	APBD II			634,789,540
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	luas kawasan kumuh yang tertangani	Kabupaten Balangan	3 ha	111,388,300	APBD II		3,3 ha	122,527,130
				Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama dalam perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU	Kabupaten Balangan	6 dok	111,388,300	APBD II			122,527,130
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Kabupaten Balangan	95%	3,958,166,000	APBD II		96%	4,353,982,600
				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh yang telah direhab	Kabupaten Balangan	70%	3,958,166,000	APBD II		75%	4,353,982,600
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	Kabupaten Balangan	110 unit	3,958,166,000	APBD II			4,353,982,600
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Kabupaten Balangan	87%	48,359,069,950	APBD II		89%	53,194,976,945
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan urusan penyelenggaraan PSU perumahan	Kabupaten Balangan	87%	48,359,069,950	APBD II		89%	53,194,976,945
				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kabupaten Balangan	1 dok	31,620,000	APBD II			34,782,000
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan nyang disediakan PSU yang menunjang fungsi hunian	Kabupaten Balangan	8 lokasi	48,327,449,950	APBD II			53,160,194,945
								213,349,852,119				234,684,837,331

4.2 Analisis Sosial Ekonomi

Dalam dokumen perencanaan Renstra, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan memiliki tujuan dan sasaran “ Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur public dan Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman “ dimana didalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut Dinas PUPRPERKIM menggunakan

beberapa program diantaranya program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang mana ketiga program itu sasaran langsung untuk penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Balangan. Untuk program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh sasaran nya adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang dilakukan Dinas PUPRPERKIM didalam program itu adalah bantuan rehabilitasi dan pembangunan rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Balangan.

Sedangkan untuk program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang dilakukan Dinas PUPRPERKIM dalam rangka mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Balangan yaitu dengan membangun prasarana sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah sedangkan untuk program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang dilakukan Dinas PUPRPERKIM adalah melakukan penambahan sambungan rumah untuk ketersediaan air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 di lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan kebinamargaan yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi RENJA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan. Semoga RENJA tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Balangan tahun 2023. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan.

Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Uraian rencana program/ kegiatan serta sub kegiatan yang terdapat pada rencana kerja tahun 2023 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Balangan.

Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada rencana kerja 2023 maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat dimasukkan kembali kedalam rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2023 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing- masing perangkat daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten / kota, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2022 sebagai berikut:

- 1) Di dalam Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2023 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 2) Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2023 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Kalimantan Selatan maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Balangan dan Renstra Dinas).

Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang.
- c. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
- d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

- e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Paringin, Mei 2022

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**



RAHMADIAH, MT
Pembina / IV a
NIP. 19760309 200604 2 007